

Analisis perubahan dalam bentuk bantuan pemerintah terhadap kemiskinan di kota Medan

Juliana Nasution, M.E¹, Rahmat Hidayat², Samsi Efendi³, Fajar Nugraha⁴, Asrul Aswinata⁵

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

juliananasution@uinsu.ac.id, rhmt98092@gmail.com, samsiefendi06@gmail.com,
nugrahaflb99@gmail.com, asrulaswinata2001@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the model of poverty alleviation in Medan City through econometric approach. This research used secondary data time trend (time series) of the years 2000-2010. The method of analysis used is the econometric method with variables that affect poverty is economic growth, income per capita, inflation and unemployment. The data was processed using the program EViews 5.1. The model is the data analysis using multiple linear regression Ordinary Least Square method (OLS). The results showed that the number of poor people in the city of Medan relatively large approximately 10,05% of the population of the city of Medan in 2010. Test results showed variable estimates of economic growth and per capita income has negative and statistically significant, while inflation and unemployment variables have a positive and significant impact on the number of poor people in the city of Medan.

Keywords: *Economic growth, income per capita, Inflation, Unemployment, Econometrics*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acap kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang

ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas).

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Upaya pengentasan kemiskinan sebenarnya telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan ditahun 1970-an tidak maksimal sehingga jumlah orang miskin pada awal tahun 1990-an kembali naik.

Kota Medan yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Utara termasuk salah satu kota yang mempunyai persentase penduduk miskin yang relatif besar karena jumlahnya mencapai 212.300 jiwa atau sekitar 10,05 % dari jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2010. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya. Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Kota Medan sehingga menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan.

Melihat kondisi jumlah penduduk miskin di Kota Medan yang relatif masih besar, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menekan jumlah kemiskinan. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tanpa mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut, maka kebijakan tersebut kurang efektif dan tepat pada sasarannya. Oleh karena itu, salah satu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui kajian faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonometrika. Selanjutnya, model tersebut diharapkan mampu mensimulasikan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dan mampu digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004) adalah ketimpangan untuk memperluas pilihan - pilihan hidup, antar lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketarampilan maupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi yang buruk sehingga hanya sebagian penduduk terkonsentrasi di

sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Nasikun (dalam Suryawati:2005) menyoroti beberapa dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu

1. Policy induces procbijakan antikeeses : proses kemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kekbijan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Socio-economi dualism : negara ekonom,i mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skla besar dan berorientasi ekspor.
3. Population growth : perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pagan seperti deet hitung.
4. Resources management and the environment : adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajement pertanian yabg asaln tebang akan menurunkan produktivitas.
5. Natural cyles and proceses : kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak mamungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. The marginalization of woman : peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai kelas golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki - laki.
7. Cultural and etnic faktor : bekerjanya faktor budaya dan etnik yang mamalihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya., serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. Exploitative intermediation : keberadaan penolong yangmenjadi penolong seperti rentenir (lintah darat)
9. Internal political fragmentation and civil strafe : suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. International proceses : bekerjanya sistem - sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin(Hermanto Siregar dan Dwi wahyuniarti, 2007).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pertama kali dikemukakan oleh Simon Kusnets.Dalam Todaro (2009) Kusnets mengatakan bahwa hubungan antara pertubuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva *U-Shape* terbalik.Dasar dari hipotesis Kusnetz adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi.Ia mengatakan, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Inflasi adalah proses kenaikan harga -harga umum barang- barang secara terus- menerus (Nopirin,1990).Menurut Sadono Sukirno (2008) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkantingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalamperiode waktu tertentu.Berdasarkan jenisnya inflasi di bagi tiga (Sadono Sukirno, 2008) :Inflasi tarikan permintaan Inflasi ini biasanya terjadi

pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial seluberlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah pada Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian ini juga berhubungan dengan adanya beberapa permasalahan terkait kemiskinan yang muncul yang dapat menjadi faktor kesalahan dalam proses implementasi suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara secara mendalam (in dept interview). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung baik dengan cara wawancara dan observasi (dengan menggunakan pedoman wawancara/observasi) dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang dianalisis diperkuat dengan data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data setelah pengumpulan data, antara lain data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan data verification (verifikasi data) (Sugiyono, 2013: 337).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan merupakan salah satu pemerintah kota yang melakukan kebijakan dalam penanganan kemiskinan wilayah perkotaan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employment Program*), dan Proyek Pembangunan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Program*), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dan lain.

Pada tahun 2015 yang lalu Kota Medan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penanggulangan kemiskinan wilayah perkotaan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan peraturan daerah tersebut dibuat adalah sebagai penjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpartisipasi dalam kehidupan

sosial dan politik.

Berdasarkan Data BPS Sumatera Utara tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin kota medan berjumlah 204 ribu jiwa. Namun Menurut Data dari Dinas Sosial Kota Medan hanya 52.400 jiwa warga miskin yang menerima Program PKH, sedangkan penerima BPNT hanya 65.362 jiwa. Guna mengurangi angka kemiskinan warga kota medan, Pemerintah Kota Medan seharusnya serius dan segera mungkin menerapkan dengan baik Perda Kota Medan No. 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Gambaran Demografi kota Medan

Berdasarkan sisi demografi, kota Medan pada saat ini sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi ini menunjukkan suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah seperti perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Sementara disisi yang lain adanya faktor perbaikan gizi dan kesehatan yang memadai akan mempengaruhi tingkat kematian yang semakin menurun. Pada tahun 2005, penduduk kota medan saat ini diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari jumlah pria, (1.010.174 jiwa > 995.018 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk commuter. Dengan demikian Kota Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memiliki deferensiasi pasar.

Gambaran Perekonomian Kota Medan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membawa pada pertumbuhan ekonomi nasional negatif. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Kota Medan, dimana laju pertumbuhan ekonmo mengalami penurunan hingga 18,11%. Namun pada tahun 2001, laji pertumbuhan ekonomi Kota Medan trus meningkat hingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,23%. Walaupun belum pulihnya perekonomian nasional, para pelaku ekonomi sudah mulai melakukan perbaikan danantisipasi dibidang ekonomi dan didukung dengan suku bunga bank yang menurun sehingga kengiatan ekonomi sektor rill mulai bergerak menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Medan mengalami kenaikan positif.

Penduduk Miskin Kota Medan

Jumlah penduduk miskin di Kota Medan dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Kondisi ini juga di perburuk oleh adanya krisis ekonomi yang melanda yang ditandai dengan tidak stabilnya kondisi perekonomian. Sehingga pada tahun 1998 adalah kondisi terparah jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Medan. Keberadaan jumlah penduduk miskin itu terus bertambah namun tingkat kemiskinannya semakin menurun.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin Dan Persen Penduduk
Kotamedan Tahun 2000 - 2010

Tahun	Penduduk miskin (juta jiwa)	%sen Penduduk Miskin (jiwa)
2011	19.054,59	6,38
2012	19.260,52	7,25
2013	19.630,86	7,12
2014	19.930,61	7,25
2015	20.061,42	7,13
2017	20.361,85	6,93

2018	20.672,93	7,77
2019	20.831,56	7,17
2020	21.021,05	6,63
2021	21.210,53	9,58
2022	21.093,39	9,84

Sumber: Badan Pusat Statistik

DESKRIPTIF VARIABEL

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Sejalan dengan peningkatan PDRB ADH Konstan 2000 Kota Medan selama periode 2014-2016, pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama periode yang sama, meningkat rata-rata di atas 5 persen per tahun yaitu 6,98 persen dari tahun 2014-2015 dan 7,77 persen dari tahun 2015-2016. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2004-2006 juga menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan tahun 2006 relatif tinggi (7,77 persen).

Gambaran Pendapatan Perkapita

Distribusi pendapatan yang diukur dengan rasio gini merupakan gambaran dari aliran pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebaiknya diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini juga dikemukakan oleh Todaro. Ia mengatakan bahwa *Gross domestic Produk/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun Masalah dasarnya bukan hanya menumbuhkan GNI, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu Negara ataukan hanya segelintir orang. Jika hanya segelintir orang yang menubuhkan GNI ataukah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah (Todaro dan Stephen C.Smith, 2006, Dawey, 1993). Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Gambaran Inflasi

Perkembangan inflasi di Kota Medan selama periode tahun 2014-2016 dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat. Selama periode tahun 2004-2006, inflasi tertinggi terjadi tahun 2015 mencapai 22,91 persen. Dengan berhasilnya inflasi dikendalikan pada tahun 2016, untuk tahun-tahun kedepannya diharapkan berbagai kebijakan dan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar inflasi tahun yang akan datang diharapkan juga dapat ditekan berada diangka 1 digit. Tingkat inflasi pada tahun 2015 sebesar 22,91%, lebih disebabkan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga secara berantai menyebabkan meningkatnya harga-harga komoditi lainnya seperti bahan makanan jadi, (23,80 persen), makanan jadi (11,74 persen), perumahan (17,11 persen), sandang (8,72 persen), kesehatan (4,88 persen), pendidikan (3,52 persen) dan transportasi(62,21 persen).

Gambaran Pengangguran

Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi selama periode 2006 - 2008 adalah relative masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Munculnya pengangguran ini disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja sehingga mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Medan. Di samping itu, adanya kemungkinan mereka yang tadinya bekerja tetapi tidak bekerja lagi dan sekarang berubah menjadi ibu rumah tangga. Kondisi di atas juga menunjukkan terjadi perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Medan, dimana pada tahun 2016 sebesar 62,21% menjadi 58,62% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali menjadi 62,58%.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam penetapan sasaran memperhatikan sumber data, yaitu data terpadu program penanganan fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Beras Sejahtera (RASTRA) atau Bantuan Sosial Pangan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Dana Desa. Berkaitan dengan sasaran kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Standar kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi akan terlaksana apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosio-kultur yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).

Menurut Purwanto (dalam Ramadani, T:2019), mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur standar dan sasaran kebijakan. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, B: 2012), yaitu pertama, mungkin disebabkan oleh bidang kebijakan terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan. Kekaburan dalam ukuran oleh pembuat keputusan akan dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang diberikan tanggung jawab implementasi pada tingkat organisasi yang lain atau sistem penyampaian kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementors mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dan sebagaimana tujuan sesungguhnya dari kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar jika kebijakan ini dipahami oleh setiap pelaksana di lapangan.

Berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan, tentunya tidak terlepas pada program penanggulangan kemiskinan yang satu ini, yakni program keluarga harapan (PKH).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ahmad, SP selaku Camat Medan Belawan saat ditanyai mengenai Standar kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) beliau mengatakan bahwa:

Adapun standar yang digunakan dalam PKM adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Belawan, yang mengemukakan bahwa:

Sesuai dengan permensos standarnya. Jadi, kriteria yang ingin dicapai kita sesuaikan dari permensos tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan lain yang mengatakan bahwa:

Untuk standar dari Kebijakan BPJS Kesehatan berasal dari permenksos. Jadi bagaimana kriteria yang ingin dicapai harus sesuai pada permensosnya.

Standar dari kebijakan Program Keluarga Harapan, yaitu yang berasal dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Standar yang dibuat pemerintah sudah mampu menjadi pegangan dalam menjalankan kebijakan. Kepahaman para pelaksana terhadap tujuan/sasaran dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu penentu berjalannya kebijakan dengan baik dengan tepat sasaran. Berbicara mengenai sasaran kebijakan program keluarga harapan (PKH), Bapak Ahmad, SP selaku Camat Medan Belawan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

Berkaitan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam hal ini Program PKH. Bahwa tujuan dari pada PKH ini, adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu PKH ini tujuannya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bisa dibilang ya kalau tujuan PKH ini untuk memutuskan rantai kemiskinan yang ada di masyarakat inilah, biar mereka dapat terbantu sekalipun tidak semua dapat ditolong tapi setidaknya pendidikan sudah lebih diperhatikanlah karena telah ada PKH ini pak.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Belawan, yang mengemukakan bahwa:

“Kebijakan PKH ini pastinya bisa membantu masyarakat miskin pak, tujuan dari program PKH ini adalah untuk menciptakan perubahan perilaku dimasyarakat sehingga mereka lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya serta penerima program PKH ini semakin mandiri dalam mengakses layanan kesehatan serta kesejahteraan sosial pak.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan. meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM, meningkatkan status kesehatan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM.

Penerima Program dari PKH ini sudah tetap sasaran karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang layak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ahmad, SP selaku Camat Medan Belawan,

beliau menyampaikan bahwa:

Kalau dibidang sasarannya telah tepat sasaran karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang layak untuk menerima bantuan PKH. Dan kami selalu pelaksana PKH ini kami juga hanya memverifikasi data yang telah di berikan dari pusat, artinya kami tidak berhak menentukan siapa orangnya yang menerima bantuan PKH ini, kami hanya meneruskan data yang telah diberikan dan sasarannya sesuai data yang ditetapkan oleh pusat telah tepat sasaran. Sebagian memang sangat kasihan juga karena data BPS mungkin dilakukan 5 tahun yang lalu, sehingga banyak masyarakat yang juga termasuk miskin dan layak menerima bantuan PKH itu tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pernyataan dari Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Belawan, yang mengatakan bahwa:

Saya rasa telah tepat sasaranlah PKH ini diberikan, karena memang yang menerima bantuan ini itu adalah warga yang di bawah yang maksudnya ya miskin lah, dan yang pasti ada Ibu Hamil, anak-anak sekolah dan yang lainnya, ya saya rasa kalau di Medan Belawan ini, tapi ada juga di Medan Belawan kondisi ekonominya sama, misalnya sebagian masyarakat telah memiliki kriteria terdiri dari Ibu Hamil, Nifas, Balita, anak persekolahan dari mulai SD hingga SMA, Disabilitas, seta Lansia dulu sebutan mereka ini RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), tapi gak dapat, Cuma ya mau apalagi yang di bilang, kita bekerja hanya sebagai pendamping, dan pendamping itu tidak punya hak untuk memasukan nama-nama calon peserta PKH, itu uda domainnya pusat dan BPS, tugas kita memvalidasi data yang kita terima dari PPKH Kota Medan Belawan.

Bantuan PKH telah tepat di berikan kepada penerima program PKH yang ada di Kecamatan Medan Belawan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum terakomodir dikarenakan data dari BPS menjadi acuan sebagai instansi yang memiliki kewenangan pendataan, sehingga dimungkinkan data-data yang diperoleh BPS yang ada bisa meningkat, bisa turun atau stagnan. Dalam penetapan sasaran penerima PKH ini berasal dari data BPS daerah yang melakukan survei di lapangan.

Setelah itu dikirim ke pusat dan diolah di pusat untuk selanjutnya pusatlah dalam hal ini (BPS pusat bekerja sama dengan Kemensos RI) yang menentukan berapa kuota dan berapa penerima bantuan PKH di daerah setelah data itu berada di daerah (PPKH Kota Medan) tugas pendampinglah untuk memvalidasi atau memeriksa apakah penerima bantuan ada apa tidaknya, seperti yang disampaikan oleh informan selaku Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Belawan, yang mengatakan bahwa:

“sebagai petugas di lapangan, tugas kami hanya memverifikasi data yang datang dari atas/pusat, atau BPS Jadi kami hanya memastikan benar atau tidaknya masyarakat itu membutuhkan bantuan tersebut. Tepatnya atau tidaknya karna datanya telah 5 tahun yang lalu, misalnya sebagian masyarakat itu telah mampu, mampu dalam artian bahwa masih ada orang lain yang lebih membutuhkan karena sebagian yang telah menerima bantuan PKH ini telah bisa mandiri. Jadi memang bukan kita jurinya, data itu dari pusat, kalau tidak layak lagi dapat kita bisa menyampaikan itu sehingga data ini juga nantinya bisa berubah itulah tugas kami untuk memverifikasi.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan, yaitu tentang manfaat dari adanya bantuan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan wawancara dengan informan

yakni Bapak Ahmad, SP selaku Camat Medan Belawan, menyatakan bahwa manfaatnya bagi masyarakat terkhusus di Medan Belawan ini sangatlah berdampak positif. PKH ini sendiri memiliki manfaat, yaitu merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. Kemudian untuk jangka pendek memeberikan incomeeffect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Selanjutnya jangka panjangnya dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan dan memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ahmad, SP selaku Camat Medan Belawan, yang mengungkapkan bahwa:

“sebagian dari penerima program bantuan penanggulangan kemiskinan mengatakan sangat tertolong dengan adanya program PKH ini, tidak hanya lumayan tetapi sangat tertolong, apalagi di bidang pendidikan ini, sebelumnya mereka kurang memperhatikan pendidikan, sebenarnya mereka ingin menyekolahkan anaknya hanya saja banyak mereka yang terkendala karena biaya, dengan adanya bantuan PKH ini telah terbantu lah untuk menyekolahkan anak mereka. Itulah manfaat yang mereka katakan dan masyarakat rasakan.

Dana bantuan program penanggulangan kemiskinan PKH ini cukup membantu KPM dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terkhusus untuk biaya pendidikan yang semangkin tahun semangkin mahal dan kesehatan anak anak mereka. Namun jika di lihat dari besaran bantuan PKH yang tidak begitu besar tidak dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk keperluan lainnya.

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara teratur dengan minimal kehadirannya 85% dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih.

Dalam tujuan program PKH diperlukan untuk membantu masyarakat secara ekonomi, sosial maupun juga bantuan social berupa sosialisasi yaitu menggunakan pendekatan melauai gotong royong.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai keterkaitan yang penting pada keinginan dan organisasi pelaksana. Lingkungan external dalam hal ini lingkungan ekonomi sosial dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan merupakan amanat undang-undang yang bersifat mandatory, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang menyatakan bahwa Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi ekonomi suatu keadaan dimana kedudukan ataupun posisi seseorang individu, yang ditinjau dari segi sosial seperti pendidikan dan ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan atau penghasilan. perkembangan keadaan sosial sering dikaitkan dengan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (RASTRA) atau Bantuan Sosial Pangan, dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mengetahui pelaksanaan

kebijakan Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan di Kecamatan Medan Belawan maka peneliti melihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat di kelurahan ini. Oleh karena itu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH, seperti yang disampaikan oleh informan selaku Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Belawan, yang menyatakan bahwa:

“keadaan para penerima program penanggulangan kemiskinan PKH ini cukup memprihatikan pak, karena pekerjaan mereka sebagai buruh nelayan pesisir yang jauh lah dari kata sejahtera kondisi ekonominya, padahal semua kebutuhan hidup serba mahal, sehingga mereka tidak memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dan kesehatannya karna pendapatan sangat lah berdampak terutama dari aspek pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan (Metode Ekonometrik), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kota Medan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif besar karena jumlahnya mencapai 212.300 jiwa atau sekitar 10,05% dari jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2010.
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan meningkat rata - rata di atas 5% pertahun yaitu 6.98 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 7,7 persen pada tahun 2016. Hal ini disebabkan faktor - faktor fundamental yang terus membaik setiap tahunnya.
3. Inflasi Kota Medan semakin meningkat setiap tahunnya. Ini bisa dilihat lonjakan peningkatannya pada tahun 2004 sebesar 6,64%, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 22.91%.
4. Tingkat pengangguran di Kota Medan relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja.
5. Bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin di kota Medan.
6. Bahwa inflasi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin dikota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Junaidi.2011.Skripsi. " *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang* .Medan Fe USU.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Medan dalam angka tahun 2009*, Medan, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.
- Goudzwaard Bob dan Lange de Harry,1998," *Di Balik Kemiskinan Dan Kemakmuran*,Kanisius,Yogyakarta.
- Hidayat, Paidi dan Pratamo Wahyu Ario, 2010,"*Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam Ekonometrika*", Edisi II, Medan Usu Press.
- Jusmaliani, 2010. "Good Governace dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi di Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume XVIII(2).
- Muzakkir Ma'ruf.2001. Skripsi. " *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Jamaah Haji Di Kota Medan*". Medan FE-USU
- Putra, andhika.2009.*Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)*,Studi Pada Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatra Utara.
- Rahmat Nazmi . 2011.Skripsi. " *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Jumlah PendudukMiskin di Kabupaten Deli Serdang* ".Medan Fe Usu.
- Remi Soemitro Sutyastie dan Tjptoherijanto prijono, 2002," *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*",*Edisi Indonesia - Inggris*, Rineka Cipta,jakarta.
- Siregar, Hermanto. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin
- Suheri.2012.Skripsi." *Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi ekspor non-migas Sumatra Utara*.perpustakaan Fakultas Ekonomi USU.Medan.
- Toni H.Siregar.2012. Skripsi. ' *Analisis Faktor -Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Petani Lahan Kering D Kabupaten Dairi*.Medan FE- Usu